

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* PENYELENGGARAAN E-KTP DI KABUPATEN PRINGSEWU

Maria Magdalena Widianti

Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung

Jl. Wisma Rini No. 09 Pringsewu Lampung

website: www.stmikpringsewu.ac.id

E-mail : Mariawidianti@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya penerapan E-Government dapat berupaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik sehingga memudahkan dalam pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang bertema "Implementasi E-Government Penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu". Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dalam pembuatan E-KTP secara efektif dan efisien. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya E-KTP, terbatasnya alat yang disediakan membuat proses pencetakan E-KTP terhambat, sehingga program E-KTP di Kabupaten Pringsewu belum maksimal.

Kata Kunci : E-Government, Penyelenggaraan E-KTP, dan Implementasi.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintahan (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik.

Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat/daerah serta masyarakat luas, agar terjalin suatu sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan dalam administrasi kependudukan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Impres Nomor 3 tahun 2003

tentang Elektronik Government. Dikatakan bahwa pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pemerintah dalam mensukseskan *E-Government* adalah dengan membuat Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diwujudkan melalui Elektronik Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut E-KTP. E-KTP menurut UU No.24 tahun 2013 perubahan dari UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. E-KTP mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada diri seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan perekaman sidik jari. Satu orang hanya akan memiliki satu NIK dan dicantumkan dalam E-KTP. Artinya satu NIK satu E-KTP.

E-KTP merupakan salah satu program Nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana

pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini meliputi penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien melalui salah satunya program E-KTP.

2. Untuk mempermudah pihak Kabupaten Pringsewu dalam mendata jumlah warganya yang wajib E-KTP dengan adanya E-Government.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat membantu meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dalam pembuatan E-KTP.

2. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dengan adanya program E-KTP.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian E-Government

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negara, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislative, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis.

Menurut World Bank memberikan definisi dari istilah E-Government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga Negara, pelaku bisnis, lembaga-lembaga pemerintahan yang lain.

Menurut Wicaksana (2007) dalam artikelnya konsep E-Government didefinisikan sebagai

upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas, dan menjadi penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggungjawab serta transparan kepada masyarakat.

2.1.1 Manfaat E-Government

Adapun manfaat E-Government meliputi :

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum karena adanya keterbukaan (transparansi).
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
4. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau video conferencing.

2.2 Pengertian Elektronik-KTP

E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (sumber: Pasal 13 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

2.2.1 Manfaat E-KTP

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Sumber: Persiapan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan Penerbitan NIK dan Penerapan Kependudukan dan Pencatatan Sipil), manfaat KTP bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara, diantaranya yaitu :

1. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya yang

berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu, sehingga sering terjadi permasalahan.

3. Dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda atau KTP palsu, dimana selama ini para pelaku criminal selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.

2.3 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka akan terjadi kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.4 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah system informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara dimana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis, maupun pemerintahan.

Menurut Mc Leod Sistem Informasi adalah suatu system yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi.

Menurut Kertahadi (2007) Sistem Informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, mengorganisasikan, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data ini antara lain :

1. Metode Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi jurnal penelitian, dokumen/berkas, mengumpulkan data, dan peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan evaluasi layanan informasi publik berbasis web dengan studi pustaka yaitu mencari, mempelajari, merangkum berbagai macam pustaka, teori-teori yang berkaitan dengan E-KTP dengan menggunakan google dan google.cendikia.ac.id.

2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan/melihat dan meneliti secara langsung untuk melihat kebutuhan apa yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan ke masyarakat.

3. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dimana pihak penanya berhadapan langsung secara fisik dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Bidang Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil mengenai penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu.

3.2 Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, dokumen dan sebagainya. Pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansive.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, dan diresmikan pada tanggal 03 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Saat ini Pringsewu disetujui menjadi Kabupaten tersendiri karena perkembangan yang bagus, baik dari segi pendapatan Daerah, taraf ekonomi maupun Pendidikan penduduk. Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang.

Dari hasil penelitian berdasarkan data yang diambil dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 sebanyak 417.292 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 215.293 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 201.999 jiwa. Dimana jumlah keseluruhan penduduk tersebut terdiri dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, yaitu Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Adiluwih. Dari jumlah penduduk diatas yang wajib KTP sebanyak 305.793 orang. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 244.339 orang, belum cetak/print-ready KTP sebanyak 1.640 orang dan yang belum melakukan perekaman sebanyak 61.454 orang.

4.2 Pembahasan Penelitian Implementasi E-Government Penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu, meliputi beberapa faktor yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan pembuatan E-KTP untuk memberikan layanan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menentukan hasil kerjanya melalui program E-KTP dimana penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk yang tidak bisa digandakan dan berlaku seumur hidup. E-KTP juga diharapkan dapat menjadi dasar dari Daftar Pemilik Tetap (DPT) dalam pemilihan umum.

2. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, karena komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan pemikirannya, harapan, dan tujuan kepada orang lain (masyarakat). Sehingga

pelaksanaan program E-KTP dapat mencapai sasaran yang tepat dan tidak terhambat pelaksanaannya. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu bagi terlaksananya E-KTP. Berkaitan dengan sosialisasi program E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi kepada pihak kecamatan. Selanjutnya pihak kecamatan melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat ke kantor kecamatan untuk diberikan pengarahan mengenai E-KTP. Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama beberapa hari. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program E-KTP, sehingga ketika ingin mengurus E-KTP masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Pihak pelaksana program E-KTP telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dengan baik mengenai pentingnya melaksanakan program E-KTP. Namun masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli dengan informasi tersebut dan menganggap sepele, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki E-KTP karena kurang menyadari pentingnya melakukan perekaman E-KTP.

3. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini dapat berupa sumber daya manusia dan peralatan. Sumber daya menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, program tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan E-KTP, dilihat dari kemauan menyediakan sumber daya manusia dan tempat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program E-KTP.

Dalam suatu organisasi maupun program sumber daya manusia memiliki peranan sangat penting, karena sumber daya manusia yaitu individu-individu yang bekerja dalam organisasi yang mencurahkan pikiran dan memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha yang mereka lakukan guna mensukseskan program E-KTP tersebut. Tanpa sumber daya manusia yang berkompeten semua program tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya individu-individu yang mempunyai tingkat pendidikan formal, potensi diri, keterampilan, dan pengalaman kerja akan dapat menguasai tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan, sehingga mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan dapat mencapai tujuan.

Selain itu, sumber daya peralatan yang disediakan di Kabupaten Pringsewu sudah baik. Sumber daya peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dari system E-KTP, mesin foto, mesin sidik jari, mesin pembaca tanda tangan dan mesin pencetakan E-KTP. Dilihat dari setiap Kecamatan sudah memiliki alat perekaman E-KTP, sehingga masyarakat yang akan membuat E-KTP terlebih dahulu datang ke Kecamatan masing-masing untuk melakukan input data, sedangkan proses pencetakannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Walaupun demikian masih banyak E-KTP yang belum di cetak, sehingga menjadi terhambat dan tidak ada kepastian jelas kapan pencetakan E-KTP tersebut akan terselesaikan. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban dan jumlah masyarakat wajib E-KTP yang akan dilayani.

4. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap, watak dan karakteristik yang dimiliki para pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu pihak pelaksana program ini tertata cukup baik terlihat dari pembagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya atau kewenangannya, sehingga dapat berjalan teratur dalam melaksanakan tugasnya. Para pegawai yang ditugaskan juga sudah mendapatkan pelatihan Bimbingan Teknologi (Bimtek) sebagai operator E-KTP. Pihak pelaksana juga dituntut untuk berkomitmen, jujur, bersikap demokratis dan tampil ramah sehingga masyarakat merasa dihargai/dihormati dan masyarakat tidak memberikan komentar yang negatif kepada para pihak pelaksana.

Namun dalam pelaksanaan program E-KTP, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembuatan E-KTP, rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor Kecamatan untuk melakukan perekaman E-KTP, lalu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencetakan E-KTP yang terletak di Kabupaten Pringsewu karena alasan ekonomi. Dikarenakan jarak yang cukup jauh antara rumah masyarakat sehingga mengurangi antusias warga dalam mengurus E-KTP.

5. Birokrasi

Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefisienan dan

menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operational Procedure (SOP) yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Standard Operational Procedure (SOP) diperlukan sebagai pedoman dan pengarahan dalam pelaksanaan E-KTP.

Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan bahwa dalam penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu telah berjalan sangat baik. Selain itu pihak pelaksana juga sudah melaksanakan koordinasi dengan cukup baik, misalnya koordinasi antar bagian, koordinasi dengan pihak capil dan koordinasi dengan pihak kecamatan. Dengan adanya kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan E-KTP diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bentuk implementasi dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan pembuatan E-KTP yang dilakukan secara elektronik yang sebelumnya masih KTP manual (SIAK). Dimana penduduk hanya bisa memiliki 1 (satu) KTP yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi identitas diri yang tidak bisa digandakan dan berlaku seumur hidup. Tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan program E-KTP yaitu agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari pihak luar dalam penggunaan KTP manual untuk kepentingan diri sendiri dan tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya E-Government dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat dan murah bahkan gratis serta aksesnya terjangkau. Dari hasil analisis peneliti yang dilakukan bahwa dalam penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu belum berjalan secara efektif, sehingga belum mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang perlu disampaikan :

1. Masih banyak kekurangan dan keterbatasan fasilitas dan layanan yang diberikan, sehingga pihak pemerintah harus segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan E-KTP itu sendiri.

2. Masyarakat diharapkan lebih menyadari pentingnya melakukan perekaman E-KTP, dan memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan berlaku seumur hidup.

3. Sosialisai yang dilakukan antara pihak pelaksana dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan E-KTP.

4. Bagi peneliti mengharapkan kritik dan saran para pembaca guna untuk memperbaiki karya ilmiah ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain.

<http://www.dosenpendidikan.com/12-pengertian-dan-fungsi-sistem-informasi-menurut-para-ahli/>

DAFTAR PUSTAKA

Arif Ahmad Thoifur, Hambali. (2012). Jurnal Ilmu Administrasi Negara : *Implementasi Kebijakan Program E-KTP di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*, FISIP Universitas Yudharta Pasuruan.

Karnova Dewi, Maryani. (2014). Jurnal Administrasi Pembangunan : *Implementasi E-Government Penyelenggaraan E-KTP*, FISIP Universitas Riau.

Putera Roni Ekha, Tengku Rika Valentina. (2011). Jurnal MIMBAR : *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*, FISIP Universitas Andalas Padang.

Rahmaningsih Eny. (2014). Jurnal S-1 Administrasi Negara : *Implementasi Kebijakan Pembuatan Elektronik-KTP di Kecamatan Pontianak Utara*, Universitas Tanjungpura.

Sary, Yoshida. (2014). Jurnal TIME : *Analisa Kelayakan Proyek E-Government untuk Pengambilan Keputusan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) Studi Kasus pada Dinas Kominfo Medan*, STMIK TIME.

Website

[http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-
implementasi-menurut-para.html](http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html)

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi

<http://sriyanthigeg.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html>